

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya.
- Amirudi dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2001, *Politik Tanah*, Pustaka Margaretha, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- EmirzonJoni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gayuh Arya Hardika, 2004. *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, TradeUnion Right Centre
- Hari Sangka. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdana*
- Harahap Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ichsan Malik, dkk, 2007. *Menyimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Sumber Daya Alam*, Jakarta
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama
- John.M. Echlos dan Hasan Shadily, 1996. *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Koentjaraningrat, 1982. *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Maleong J.Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, , PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maria SW. Sumarjono, 2007, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta
- Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 2004.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.

Sarjita, 2002, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja, Yogyakarta

Sjahmunir, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Kampus Unand Limau Manis Padang

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Subagyo P. Joko, 2005, *Meode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Subekti & Tjitrosudibio, 1985 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta, Pradnya Paramita

Sudarsono, 2002. *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Sulastriyono, 1997, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana UI, Jakarta

Sumardjono Maria S.W., 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Susanti, A.N, 2007, *Naskah Akademis Mediasi, Makamah Agung RI*, Jakarta

Suyut Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, PT. Graha Indonesia

Sunggono Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto Soejono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajawali Press, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta.

Undang-Undang

1. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria.
2. UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan
4. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
5. PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 Terkait Penanganan Masalah Pertanahan baik litigasi maupun non litigasi.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
12. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
13. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.